

Penolakan Korban *Comfort Women System* Dari Korea Selatan Terhadap 2015 Japan-ROK Agreement On Comfort Women

Dinda Claudia Ayu Eka Putri
Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: dinda.caep@gmail.com

Abstract

Japanese comfort women system was a military prostitution system that did not only cause war crimes, but also involved gender-based violence which put the comfort women as victims. This issue gained international exposure due to demands against the Japanese government that hadn't fulfilled its responsibilities towards the victims, especially the victims from South Korea. Despite the Japanese government's various efforts until the 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women with the South Korean government, this issue still remains unresolved from the perspective of the victims from South Korea. Although the perspective of states deems the issue of comfort women resolved through bilateral reconciliation, the gender approach seeks to declassify this as an unresolved issue from the perspective of the victims as the party directly affected by the comfort women system. The ignorance by putting aside the victims' perspective in viewing the issue and excluding the said victims from the resolution process eventually encouraged the victims to continue demanding justice from the Japanese government.

Keywords: *Comfort women, Japan, South Korea, gender approach, rejection, demands*

Abstrak

Japanese comfort women system merupakan sistem prostitusi militer yang tak hanya menjadi kejahatan perang, tetapi juga melibatkan kekerasan berbasis gender sehingga menjadikan para comfort women sebagai korban. Isu ini menandai sorotan komunitas internasional karena adanya tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah Jepang yang belum memenuhi tanggung jawab pada para korban, utamanya para korban dari Korea Selatan. Meskipun pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya hingga menandatangani 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women dengan pemerintah Korea Selatan, isu ini masih belum selesai dari perspektif para korban dari Korea Selatan. Jika perspektif negara menilai isu comfort women selesai melalui rekonsiliasi bilateral, maka pendekatan gender berusaha mendefinisikan bahwa isu ini belum selesai dari perspektif para korban sebagai pihak yang terdampak langsung dari adanya comfort women system. Keabaian dengan mengesampingkan perspektif korban dalam melihat isu dan tidak dilibatkannya para korban dalam proses resolusi isu ini pun membuat para korban terus bergerak untuk menuntut keadilan pada pemerintah Jepang.

Kata Kunci: *Comfort women, Jepang, Korea Selatan, pendekatan gender, penolakan, tuntutan*

Pendahuluan

Secara harfiah, *janfu*—jeonggun wianbu dalam bahasa Korea—berarti military comfort women atau perempuan-perempuan yang diperkerjakan dalam prostitusi militer.

Tak hanya terdiri dari pekerja seks komersial, tetapi juga para perempuan yang dipaksa atau terpaksa melayani kebutuhan seksual tentara imperial Jepang semasa Perang Dunia II baik melalui koersi, penculikan, hingga penipuan (Senda dalam Sato, 2014). Isu

comfort women menjadi sorotan dunia karena para korban, utamanya dari Korea Selatan dengan jumlah korban terbesar, mengklaim bahwa pemerintah Jepang belum memenuhi tanggung jawabnya atas itu ini. Meskipun berbagai upaya untuk menangani isu ini hingga disepakatinya 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women dengan pemerintah Korea Selatan menjadi justifikasi pemerintah Jepang bahwa permasalahan ini telah disepakati selesai dari perspektif kedua negara, permasalahan ini belum selesai dari sudut pandang korban.

Fakta mengenai eksistensi comfort women baru menyeruak ke publik internasional setelah salah satu korban dari Korea Selatan, Kim Hak-sun, menjadi korban pertama yang mengungkapkan pengalamannya sebagai comfort women pada 14 Agustus 1991 setelah lama bungkam (Hayashi 2008, 123-30). Pengakuan ini mendorong 37 kelompok perempuan dan kelompok aktivis di Korea Selatan untuk berkolaborasi membentuk The Korean Council for the Women Drafted for Sexual Slavery—dalam bahasa Korea disebut Han-guk Jeongshindaemunjedaeche'aekhyeob-uhoe, disingkat Jeongdaehyeob—atau KCWS sebagai women redress movement, yakni gerakan yang mendukung dan mengadvokasi tuntutan-tuntutan korban dari Korea Selatan terhadap pemerintah Jepang serta mengusahakan keadilan bagi korban utamanya hak reparasi dan kompensasi (Kim 2015, 1-2; Kumagai 2016, 6).

Bersama dua korban lain, Kim Hak-sun melayangkan gugatan pada pemerintah Jepang dengan tuntutan-tuntutan: (1) Pengakuan atas fakta historis bahwa Jepang memaksa para perempuan untuk menjadi comfort women di daerah peperangan dan permintaan maaf atas fakta tersebut, (2) Investigasi penuh mengenai operasi Japanese military comfort women system dan publikasi atas investigasi tersebut, (3) Kompensasi finansial bagi

comfort women yang masih hidup dan keluarga mereka, (4) Pembicaraan mengenai fakta-fakta comfort women dan tidak mengulangi kejahatan yang sama di masa depan (Hayashi 1999, 54-64). Para korban dari Korea Selatan, masih didukung women redress movement, mengadakan Demonstrasi Rabu atau Wednesday Demonstration pertama di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul pada 8 Januari 1992 (Jeongdaehyeob t.t.b) untuk menuntut pengakuan, permintaan maaf, dan kompensasi dari pemerintah Jepang.

Lebih dari satu dekade tanpa pergerakan berarti dari pemerintah Jepang maupun pemerintah Korea Selatan, para korban didukung women redress movement terus melakukan pergerakan. Bertepatan dengan Demonstrasi Rabu ke-1000 pada 14 Desember 2011, para korban dan KCWS mendirikan patung Pyeonghwabi atau Statue of Peace sebagai personifikasi penderitaan para korban comfort women system dan ditempatkan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul (Jeongdaehyeob t.t.c). Tak hanya peringatan simbolis, patung ini menjadi pernyataan konfrontatif para korban bahwa pemerintah Jepang tak kunjung memenuhi tanggung jawabnya (Korea Verband 2017) sehingga 'tidak ada perdamaian tanpa keadilan' (Sakamoto 2001, 4-5). Pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Jepang kemudian mengusahakan rekonsiliasi bilateral atas isu ini hingga pada 28 Desember 2015, Perdana Menteri Abe dan Presiden Park menyepakati 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women sebagai penyelesaian isu comfort women antara kedua negara (BBC News 2015).

Setelah 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women, pemerintah Jepang membayar kewajiban kompensasi sebesar 1 milyar Yen melalui pemerintah Korea Selatan untuk membantu pendanaan 46 korban Korea Selatan yang masih hidup (BBC News 2015) sekaligus untuk mendesak pemerintah Korea Selatan memindahkan patung Pyeonghwabi dari seberang

Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Hal ini menuai arus balik para korban yang menolak hasil 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women dan terus melangsungkan Demonstrasi Rabu untuk menuntut keadilan bersama publik dan KCWS. Belum patung Pyeonghwabi direlokasi dari Kedutaan Besar Jepang di Seoul (Japan Cabinet Secretariat 2016), patung Pyeonghwabi kedua justru didirikan pada 28 Desember 2016 di dekat Konsulat Jepang di Busan (Choe dan Rich 2017) tepat setahun setelah 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women disepakati. Mengancam kedua patung Pyeonghwabi yang dinilai mencederai kesepakatan kedua pihak dan mengungkit kembali permasalahan yang telah usai antara kedua negara, pemerintah Jepang menarik kembali Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan dan Konsul Jenderal Jepang pada 6 Januari 2017 (Japan Cabinet Secretariat 2017).

Isu comfort women tak hanya menyangkut imperialisme, kolonialisme, nasionalisme, militerisme, dan patriarki tetapi juga menjadi permasalahan kejahatan perang, kejahatan dan perbudakan seksual, sejarah kolonial yang belum usai, viktimisasi nasional, serta prostitusi oleh negara (Lee 2014, 72). Diperlukan pendekatan gender yang melihat comfort women system tak hanya sebagai legasi perang tetapi juga sebagai kekerasan dan terhadap perempuan dan gender (Kim 2013, 11-12) dengan adanya kekerasan seksual, eksploitasi seksual, hingga kekerasan berbasis gender. Sistem ini mengorbankan para perempuan yang perannya didegradasi menjadi sebatas pemenuh kebutuhan seksual (Mughtar 2013, 42-3), bahkan menjadi komoditas. Jika isu comfort women dinilai selesai dari perspektif negara karena telah dicapai rekonsiliasi bilateral, maka pendekatan gender mendeklasifikasi isu comfort women dari sisi korban. Melalui pendekatan gender, para korban menjadi pihak yang dirugikan akibat pemaksaan prostitusi comfort women system dan belum mencapai kepentingan mereka

sehingga mereka menolak hasil rekonsiliasi tersebut dan terus menuntut keadilan yang tak kunjung terpenuhi.

Pengoprasian *Japanese Military Comfort Woman system*

Japanese military comfort women system mengorganisir kebutuhan seksual tentara Jepang di daerah-daerah koloni hingga akhir Perang Dunia II di tahun 1945 (Soh 1996, 1127-9). Kala itu, sebagian pekerja seksual berlisensi di prostitusi legal mengidap penyakit kelamin. Di luar itu, militer Jepang juga kerap melakukan pemerkosaan terhadap para perempuan lokal daerah-daerah koloni (Hayashi 1999, 54). Petinggi militer pun menyarankan agar pemerintah merekrut perempuan-perempuan muda untuk dijadikan comfort women (Hayashi 1999, 54). Pemerintah Jepang membentuk 'prostitusi sistematis' untuk meningkatkan semangat juang dan menjaga 'moral' militer melalui pemenuhan kebutuhan seksual (Kuki 2013, 245-6). Para perempuan ini ditempatkan di asrama-asrama militer khusus yang disebut ianjo atau comfort station. Catatan dokter militer Tetsuo Aso menunjukkan bahwa mayoritas pekerja seksual Jepang berusia menengah dan sebagian mengidap penyakit kelamin sehingga pekerja seksual yang lebih muda 'berkualitas lebih baik'. Dengan rekomendasi Dokter Aso untuk dewan dokter militer Jepang, perempuan-perempuan muda Korea Selatan dijadikan comfort women di medan perang (Hayashi 1999, 55-6). Jumlah comfort women diestimasi mencapai 50.000-200.000 orang (Soh 2001) dengan 80% perempuan berasal dari Semenanjung Korea, 60% di antaranya dari Korea Selatan (Ferguson 2015) sehingga negara ini memiliki jumlah korban terbanyak (Soh 1996, 123).

Operasionalisasi comfort women system dijalankan operator-operator swasta yang bertindak sebagai manajer internal (Lee 2003, 516-7). Pihak militer bertindak sebagai pengawas dengan

regulasi meliputi penggunaan eksklusif untuk tentara dan staf militer, pembayaran, batas waktu, kebersihan, jam operasi, serta larangan alkohol dan senjata (Hayashi 1999, 55-6; Lee 2003, 516-7). Pemerintah Jepang bertindak sebagai penyedia layanan kesehatan yakni pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit kelamin dan kehamilan, serta ketentuan kontrasepsi (Lee 2003, 516-7). Ketika militer Jepang berpindah, comfort stations dan comfort women ikut direlokasi ke tempat tugas baru (Asia-Pacific Journal Feature 2015, 1-2). Tidak ada regulasi khusus mengenai transportasi comfort women sebagai individu sehingga mereka dipindahkan layaknya komoditas.

Comfort women system mengalami ekspansi karena perluasan aktivitas militer Jepang di Asia-Pasifik. Perekrutan sukarela tidak lagi memenuhi kebutuhan pekerja seksual sehingga pihak pemerintah Jepang dan agen-agen swasta mulai menggunakan tipu muslihat dengan janji pekerjaan layak untuk merekrut gadis-gadis dari daerah-daerah koloni lalu ditempatkan di comfort station (Kuki 2013, 245-6). Ketika usaha ini tidak cukup, para perempuan diculik dan dikoirsi untuk melayani tentara Jepang utamanya di garis depan (Kuki 2013, 245-6). Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II pun menghentikan pengoperasian military comfort women system.

Banyak perempuan meninggal selama menjadi comfort women baik itu karena kekerasan yang dialami, penyakit yang diderita, maupun karena kebrutalan kondisi di barisan depan perang (Lee 2003, 517-7). Pasca kekalahan, banyak comfort women dipaksa bunuh diri bersama para tentara, atau bahkan sebagian sengaja dieksekusi untuk menghilangkan jejak (Hayashi 1999, 55). Sebagian besar comfort women yang ditelantarkan di daerah-daerah koloni tidak dapat kembali ke keluarga maupun negara asalnya (Hayashi 1999, 55). Sejumlah korban yang berhasil kembali ke negara asal masih harus menanggung luka fisik dan beban psikologis dalam

masyarakat yang patriarkis (Hayashi 1999, 55), seperti yang dialami para korban dari Korea Selatan. Penyembuhan fisik, psikis, dan reintegrasi dalam masyarakat menjadi semakin sulit karena nasionalisme patriarkis kerap membuat masyarakat mengucilkan para comfort women yang menjadi simbol raibnya kehormatan nasional, humiliasi nasional, dan 'masa lalu kelam' kolonialisme (Lee 2014, 75). Para korban dinilai sebagai perempuan yang telah 'ternoda', tidak suci, dan memalukan oleh masyarakat (Kim 2015) sehingga mereka memilih bungkam karena takut pada stigma masyarakat (Lee 2003, 517-8) dan harus menanggung sendiri penderitaan mereka.

Pengangkatan Isu *Comfort Women* dan Gugatan Korban dari Korea Selatan

Dalam sesi Parlemen Nasional Jepang Juni 1991, pemerintah Jepang membantah keterlibatan negara maupun militer dalam comfort women system serta menolak untuk memberikan pernyataan maaf maupun kompensasi pada para comfort women. Pemerintah Jepang berargumen bahwa 1951 San Fransisco Peace Treaty dan berbagai kesepakatan bilateral telah menyelesaikan klaim kompensasi pasca perang, salah satunya 1965 Japan-ROK Normalization Treaty. Padahal, 1951 San Fransisco Peace Treaty tidak menyinggung isu comfort women secara spesifik (Kuki 2013, 246) dan 1965 Japan-ROK's Treaty on Basic Relations tidak menyebutkan apa pun terkait isu comfort women dari Korea Selatan (Varga 2009, 290).

Testimoni Kim Hak-sun pada Agustus 1991 tak hanya berdampak bagi pemerintah Jepang, tetapi juga mendorong pergerakan-pergerakan seperti munculnya korban-korban lain, pembongkaran dokumentasi historis sebagai bukti, dan respons pemerintah Jepang sendiri (Kuki 2013, 247). Sangkalan pemerintah Jepang terhadap kesaksian Kim Hak-sun menjadi

bumerang karena pada Januari 1992, Yoshiaki Yoshimi (2000 dalam Hayashi 2008) mengumumkan keberadaan dokumen-dokumen dalam arsip Defense Agency's National Institute of Defense Studies yang membuktikan keterlibatan langsung militer imperial Jepang dan pemerintah Jepang dalam pembentukan hingga pengendalian comfort women system. Dengan tidak adanya pilihan lain, pemerintah Jepang mengakui keberadaan comfort women system dan memberikan pernyataan maaf untuk pertama kali pada 13 Januari 1992 (Kuki 2013, 247). Perdana Menteri Kiichi Miyazawa mengakui keterlibatan militer Jepang dan meminta maaf (Hayashi 2008, 127), tapi Pengadilan Jepang menolak untuk bertanggung jawab dengan justifikasi bahwa comfort women system merupakan fenomena sporadik 'prostitusi berlisensi' (Schmidt 2000 dalam Varga 2009, 291) dan tidak ada tindakan koersif dalam sistem ini (Soh 1996, 1226-7).

Pada 4 Agustus 1993, pemerintah Jepang merilis hasil-hasil investigasi yang mengonfirmasi bahwa otoritas militer Jepang terlibat dalam pendirian dan operasi comfort station berikut rekrutmen comfort women secara koersif (Kuki 2013, 247). Perilisan ini diikuti Pernyataan Kono Yohei, Sekretaris Kepala Kabinet, yang menjadi basis permintaan maaf resmi Jepang terhadap pada korban (Ministry of Foreign Affairs of Japan 1993) serta basis pendirian Asian Women's Fund atau AWF sebagai upaya reparasi pada tahun 1993. Akan tetapi, Penolakan ini menimbulkan pergolakan, hingga para korban dan women redress movement mengkritik AWF yang tidak langsung dijalankan dan dibiayai pemerintah Jepang (Hayashi 2008, 124).

Kecewa dengan respons pemerintah Jepang, KWCS melakukan berbagai usaha seperti pertemuan dengan berbagai gerakan perempuan lain di Asia, kolaborasi dengan gerakan perempuan di Jepang, dan penghelatan Demonstrasi Rabu yang disesuaikan dengan hari kesaksian pertama Kim Hak-sun (Varga

2009, 291). Selain dari Korea Selatan, perempuan-perempuan dari Taiwan, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, Filipina, Indonesia, dan Belanda turut tampil ke publik untuk mengangkat pengalaman sebagai comfort women semasa Perang Dunia II dan beberapa di antaranya turut menggugat pemerintah Jepang (Hayashi 1999, 56).

Demonstrasi Rabu ke-1000 dan Pendirian Patung *Pyeonghwabi* Sebagai Konfrontasi Korban dari Korea Selatan

Isu comfort women kembali menuai sorotan komunitas internasional setelah pada Februari 2007, Center for Research and Documentation on Japan's War Responsibility atau JWRC menyibak bukti-bukti historis bahwa angkatan laut dan angkatan darat Jepang bertindak dalam mendirikan, mengoperasikan, meregulasi, hingga memanfaatkan comfort stations tak hanya di Jepang tetapi juga di daerah-daerah koloni. Pemerintah Jepang mengklaim comfort women system sebagai hal wajar semasa perang (Hayashi 2008, 123-30). Pengangkatan kembali isu comfort women menarik perhatian dunia internasional, hingga Amerika Serikat mengeluarkan U.S. House of Representative (2007) mengeluarkan Resolution 121 yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang harus mengakui dan menerima tanggung jawab historis serta meminta maaf pada Korea Selatan atas isu comfort women system secara jelas dan tegas. Di tahun yang sama, European Parliament (2007) mengadopsi resolusi yang meminta pemerintah Jepang untuk meminta maaf pada para korban perbudakan seksual militer. Pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Abe menolak resolusi ini karena comfort women system dinilai sebagai hal wajar semasa perang dan terdapat kurangnya bukti bahwa sistem ini merupakan hasil koersi tentara imperial Jepang (Hayashi, 2008, 123-4). Penolakan Abe bertentangan dengan Pernyataan Kono 1993 sehingga tak hanya menuai kontroversi, tetapi juga mengingatkan masyarakat internasional bahwa berbagai

persengketaan kewajiban perang Jepang utamanya isu comfort women belum terselesaikan serta kembali memicu konfrontasi para korban dari Korea Selatan.

Pada Demonstrasi Rabu yang ke-1000 pada 14 Desember 2011, para korban didukung KCWS mendirikan patung Pyeonghwabi atau Statue of Peace untuk mengenang para perempuan Korea Selatan yang menjadi korban comfort women system. Patung perunggu ini berbentuk sesosok perempuan muda yang duduk menghadap Kedutaan Besar Jepang di Seoul (Jeongdaehyeop t.t.b). Rambut pendek terpotong tak beraturan, berbalut hanbok, tangan terkepal, dan kaki telanjang menjinjit; patung ini menyimbolkan perempuan yang masih menderita, marah, dan kecewa karena pengalaman buruk dan hak yang terenggut sebagai comfort women hingga trauma membuatnya tidak merasa 'pulang' di tanah kelahirannya sendiri (Korea Verband 2017). Kursi kosong di sebelah patung menyimbolkan kesendirian para korban yang belum menerima hak mereka, bayangan patung yang berwujud perempuan setengah baya menunjukkan masa muda para korban tidak dapat dikembalikan lagi dan masa tua dibayang-bayangi penderitaan mendalam. Burung di pundak perempuan muda menyimbolkan korban yang telah meninggal dan kupu-kupu di tengah bayangan perempuan setengah baya menyimbolkan harapan untuk menerima permintaan maaf yang semestinya mereka terima (Korea Verband 2017). Patung Pyeonghwabi menjadi pernyataan simbolis sekaligus pernyataan politis para korban bahwa penderitaan mereka belum berakhir, bahkan setelah hampir tujuh dekade kemerdekaan Korea Selatan dan seribu Demonstrasi Rabu berselang, karena pemerintah Jepang tak kunjung memenuhi segala tanggung jawabnya dan 'tidak ada perdamaian tanpa keadilan' (Sakamoto 2001, 4-5). Konfrontasi ini menuai publisitas nasional sekaligus internasional hingga menyudutkan pemerintah Jepang. Dari

234 perempuan Korea Selatan yang melapor sebagai korban, hanya 63 orang yang bertahan hidup hingga Demonstrasi Rabu ke-1000 (Park 2011)

Kesepakatan Bilateral Melalui 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women dan Respon Korban Dari Korea Selatan

Pada Maret 2014, Perdana Menteri Abe Shinzo menolak untuk merevisi permintaan maaf Jepang yang telah disampaikan pada Korea Selatan tahun 1993 atas isu comfort women (Reuters 2014) hingga Presiden Park Geun-hye memanggil Perdana Menteri Abe Shinzo untuk mengusahakan rekonsiliasi bilateral atas isu ini pada November 2015 (Reuters 2015). Menlu Fumio Kishida dan Menlu Yun Byung-se mengumumkan hasil rekonsiliasi bilateral melalui konferensi pers gabungan. Menlu Kishida mengumumkan tiga poin (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2015), yakni: (1) Pemerintah Jepang menyadari tanggung jawab atas isu comfort women yang melibatkan otoritas militer Jepang dan PM Abe kembali memberikan permohonan maaf; (2) Pemerintah Jepang akan memberi kontribusi dana melalui badan yang nantinya dibentuk oleh Korea Selatan sebagai kompensasi luka psikologis para korban; serta (3) Pemerintah Jepang mengonfirmasi bahwa isu ini telah disepakati usai melalui klausa 'this issue is resolved finally, and irreversibly', dengan catatan Jepang mengimplementasikan poin sebelumnya dan masing-masing pihak tidak akan saling menuduh maupun mengkritik terkait isu ini dalam komunitas internasional termasuk PBB. Menlu Yun turut mengumumkan tiga poin (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2015), yakni: (1) Pemerintah Korea Selatan menghargai usaha Pemerintah Jepang terkait comfort women serta mengonfirmasi bahwa isu ini telah disepakati usai melalui klausa 'this issue is resolved finally, and irreversibly', dengan catatan Jepang mengimplementasikan poin yang telah diajukannya; (2) Pemerintah Korea

Selatan akan menyelesaikan permasalahan patung yang didirikan di depan Kedubes Jepang di Seoul melalui konsultasi dengan organisasi-organisasi terkait; serta (3) Pemerintah Korea Selatan bersama Pemerintah Jepang tidak akan saling menuduh maupun mengkritik terkait isu ini dalam komunitas internasional termasuk PBB.

Presiden Park menyatakan bahwa apa pun hasil rekonsiliasi tidak akan menjamin kepuasan penuh dari pihak Korea Selatan dan realitas ini tidak dapat dikesampingkan (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea 2015). Meskipun 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women menjadi kesepakatan bilateral yang mengakhiri isu comfort women antara pemerintah Jepang dan pemerintah Korea Selatan, para korban tidak memiliki pandangan sama dan bahkan tidak sepenuhnya setuju. Dua hari setelah dicapainya 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women, para korban dan KCWS melanjutkan Demonstrasi Rabu ke-1211 untuk meminta kompensasi resmi dan permintaan maaf yang tulus. Kesepakatan ini menjadi 'tamparan di wajah' para korban karena kedua pemerintah tidak bergerak untuk menemui para korban sebelum menandatangani kesepakatan, tidak mengambil sikap atas kepentingan para korban, dan menyetujui nominal kompensasi yang begitu kecil (Felden 2015; Gil 2017).

KCWS terus mendukung Demonstrasi Rabu para korban untuk menegaskan tuntutan-tuntutan yang tidak kunjung dipenuhi pemerintah Jepang, antara lain: 1) Pengakuan atas kejahatan perang, 2) Identifikasi atas seluruh kebenaran terkait kejahatan tersebut, 3) Permintaan maaf resmi, 4) Pemberian reparasi secara legal, 5) Hukuman untuk pelaku-pelaku kejahatan perang, 6) Pencatatan sejarah dalam buku-buku teks, serta 7) Kompensasi finansial dan konstruksi memorial untuk para korban (Jeongdaehyeob t.t.a). Untuk mencapai tujuan tuntutan, para korban dan KCWS memiliki misi: 1) Riset atas kebenaran isu

comfort women system, 2) Upaya implementasi tujuh tuntutan terhadap pemerintah Jepang, 3) Program pendidikan yang berkaitan dengan isu comfort women, 4) Proyek kesejahteraan comfort women, 5) Proyek riset pencarian fakta, 6) Proyek solidaritas internasional, 7) Upaya hubungan masyarakat dan publikasi terkait isu comfort women, 8) Operasi War and Women's Human Right Museum, 9) Upaya 'Butterfly' Fundraising and Support, 10) Upaya-upaya lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang disepakati (Jeongdaehyeob t.t.a).

2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women mendapat dukungan publik yang begitu rendah dan justru menerima tentangan keras dari women redress movement dan publik yang mendukung para korban. Korban bersikukuh bahwa patung Pyeonghwabi tidak akan berpindah ke manapun dan KCWS menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak bisa menyebutkan apapun mengenai pemindahan patung tersebut (The Strait Times 2016). Pemerintah Korea Selatan menyatakan tidak bisa menyampuri urusan privat kelompok-kelompok sipil dan tidak memiliki hak untuk memindahkan patung Pyeonghwabi yang didirikan kelompok-kelompok sipil, sehingga hanya berjanji melihat kemungkinan pemindahan patung tersebut (The Strait Times). Korban dan KCWS justru mendirikan patung Pyeonghwabi kedua pada 28 Desember 2016 di dekat Konsulat Jepang di Busan (Choe dan Rich 2017).

Pemenuhan Tuntunan Korban dari Korea Selatan Melalui 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women

Klausu 'this issue is solved finally and reversibly forever' menjadi klausu utama 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women yang tidak dapat diterima para korban karena mengindikasikan bahwa pemerintah Jepang dan pemerintah Korea Selatan tidak mau mengungkit kembali isu comfort women di masa depan. Para korban menolak jika isu ini

dianggap selesai begitu saja mengingat mereka tidak hanya menderita selama menjadi comfort women, tetapi juga mendapat luka fisik dan psikis serta mengalami diskriminasi sehingga tidak dapat sepenuhnya berreintegrasi dalam masyarakat.

Tuntutan korban mengenai pengakuan atas tanggung jawab pemerintah Jepang telah mendapat dukungan komunitas internasional sejak dilayangkannya gugatan pertama oleh Kim Hak-sun hingga dijalankannya Demonstrasi Rabu. Pada 6 Februari 1996, PBB mengecam Jepang yang telah memaksa ribuan perempuan dalam perbudakan seksual semasa Perang Dunia II dan pemerintah Jepang harus mengakui tanggung jawab legalnya terhadap para korban (Soh 1996, 1226). Pada 8-12 Desember 2000, Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery atau Tokyo Tribunal diadakan untuk memfasilitasi para korban yang menuntut peradilan atas eksploitasi comfort women system (Kim 2015, 7-9; Sakamoto 2001). Tokyo Tribunal menjadi peradilan kolektif pertama yang mengangkat isu comfort women, menunjukkan perkembangan isu comfort women yang didukung solidaritas internasional. Para korban dari Korea Selatan berkumpul dengan individu-individu dan organisasi-organisasi yang mendukung hingga para korban dari negara-negara lain. Pemerintah Jepang dan Kaisar Hirohito diputuskan bersalah sehingga bertanggung jawab untuk memberikan pernyataan maaf dan kompensasi bagi korban yang masih hidup (Sakamoto 2001, 4-8).

Dari segi tuntutan para korban dari Korea Selatan mengenai permintaan maaf, berbagai pernyataan resmi dan perjanjian yang telah dicapai pemerintah Jepang dengan pemerintah Korea Selatan merupakan produk rekonsiliasi diplomatik (Kumagai 2016, 12). Berkaitan pula dengan segi pengakuan dan pembongkaran fakta, pemerintah Jepang memiliki riwayat inkonsistensi dalam mengakui sekaligus menyangkal

keberadaan comfort women system. Pernyataan maaf baru diberikan ketika pemerintah Jepang terdesak tuntutan-tuntutan para korban yang disorot publik dunia, seperti inisiasi Kim Hak-sun dan konfrontasi para korban melalui dua patung Pyeonghwabi.

Pemerintah Jepang mulanya membantah keras keterlibatan militer dalam comfort women system hingga pada tahun 1993, pemerintah Jepang tidak memiliki pilihan lain selain mengakui keberadaan comfort stations dan keterlibatan militer imperial Jepang serta mendirikan AWF sebagai upaya reparasi. Pada tahun 2001, Perdana Menteri Junichiro Koizumi secara personal menuliskan pernyataan maaf dan penyesalan untuk semua comfort women yang mengalami penderitaan tak terukur karena kerugian fisik dan psikologis, serta tidak ada yang seharusnya menghindari beban masa lalu maupun kewajiban masa depan (BBC News t.t). Akan tetapi, Perdana Menteri Abe Shinzo pada Maret 2014 justru menolak untuk merevisi permintaan maaf Jepang yang telah disampaikan pada tahun 1993 (Reuters 2014) dan menolak untuk memberikan surat permintaan maaf kepada masing-masing korban karena permintaan maaf telah menjadi salah satu premis dari perjanjian yang disepakati kedua pemerintah (Gil 2017). Jika seharusnya pelaku meminta maaf pada korban dan para korban berhak untuk menerima atau menolak, kondisi ini justru membuat para comfort women sebagai korban yang meminta permintaan maaf dan pemerintah Jepang di bawah administrasi Abe sebagai pelaku yang menolak untuk meminta maaf (Gil 2017).

Terjadi kontradiksi pemerintah Jepang yang di satu sisi menyampaikan permintaan maaf ketika muncul tekanan, tetapi di sisi lain menolak untuk bertanggung jawab atas eksistensi comfort women system. Terdapat kegagalan pemerintah Jepang untuk memahami pentingnya isu comfort women dalam rekonsiliasi kejahatan perang serta perlunya pengakuan bagi

korban (Kuki 2013, 245-6). Hal ini juga menunjukkan tidak adanya pelibatan simpati untuk melihat permasalahan dari perspektif korban dan melihat pengalaman korban. Oleh karenanya, gestur rekonsiliasi pemerintah Jepang masih jauh dari pengakuan tulus atas kesalahan maupun rasa iba untuk mendapat pengampunan korban (Kumagai 2016, 12) sehingga berbagai resolusi pemerintah Jepang tidak menghadirkan pengampunan dari korban dan tidak benar-benar memenuhi spesifikasi tuntutan korban. Para korban pun tidak menyetujui pemindahan patung Pyeonghwabi dari Seoul dan justru membangun patung Pyeonghwabi kedua di Busan sebagai pernyataan konfrontatif bahwa 'tidak ada perdamaian tanpa keadilan', bahkan hingga Pyeonghwabi menjadi pergerakan global dengan pendirian patung-patung serupa di negara-negara Eropa dan Amerika (Korea Verband 2017).

Dari segi tuntutan kompensasi finansial, pemerintah Jepang memulai usaha reparasi dengan mendirikan Asian Women's Fund atau AWF pada 14 Juni 1995 (Digital Museum of The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund t.t.). AWF merupakan organisasi swasta di bawah arahan pemerintah Jepang sehingga para korban diwakili KWCS menyatakan bahwa proyek-proyek AWF justru bertolak belakang dengan tujuan untuk mengembalikan harga diri para korban (Kim 2015, 4-7). Berdirinya AWF tidak menyelesaikan isu comfort women karena badan ini tidak dijalankan dan didanai langsung oleh pemerintah Jepang, tidak memberikan pernyataan maaf yang lugas, serta tidak memenuhi semua unsur gugatan korban (Kim 2015, 4-7). Kompensasi AWF pun tidak dapat dihitung sebagai tanggung jawab pemerintah Jepang karena donasi dikumpulkan dari masyarakat serta para comfort women seakan 'dibayar' agar tidak lagi menuntut pihak-pihak yang mengoperasikan comfort women system di masa lampau (Kim 2015, 9-10). Ditutupnya AWF pada 31 Maret 2007 turut menghentikan pemberian reparasi dari pemerintah Jepang (Digital Museum

of The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund. t.t.) sehingga pergerakan para korban untuk menuntut keadilan belum sepenuhnya berakhir.

Melalui 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women, pemerintah Jepang mengedepankan 'superioritas moral' dengan memberikan 1 milyar Yen pada Agustus 2016 sesuai nominal yang telah disepakati (Gil 2017) untuk disalurkan oleh badan yang nantinya dibentuk pemerintah Korea Selatan. Jumlah kompensasi ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan biaya reparasi pemerintah Jerman untuk mengompensasi para tenaga kerja paksa semasa perang (Zoellner dalam Felden 2015). Bahkan, tidak ada data maupun bukti yang bahwa pemerintah Korea Selatan maupun pemerintah Jepang meminta pendapat para korban mengenai nominal pendanaan selama proses negosiasi (Task Force on the Review of the Korea-Japan Agreement on the Issue of "Comfort Women" 2017, 16). Nominal ini tidak dapat mengembalikan waktu yang telah terbuang, menghapus pengalaman buruk, dan meringankan beban psikologis para korban. Pemberian kompensasi berupa uang tidak dapat menjamin dukungan kesejahteraan medis dan penyembuhan beban psikologis para korban yang berusia lanjut dan hidup dalam kemiskinan.

Dari segi tuntutan korban mengenai pengajaran sejarah comfort women, pemerintah Jepang tidak menunjukkan komitmen yang menjamin pembicaraan fakta-fakta comfort women demi tidak terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Pasca dekolonisasi, Korea Selatan dan Jepang bungkam mengenai isu comfort women sehingga isu ini terabaikan dan terlupakan (Lee 2014, 74). Bahkan, pemerintah Jepang menghapus tulisan mengenai kekejaman Jepang semasa perang dari buku-buku teks pada periode 1980-an dan pada tahun 2005 (Hayashi 2008, 128). Para korban telah meminta penelitian lebih lanjut demi menguak kebenaran comfort women system. Akan tetapi, pemerintah

Jepang tidak menunjukkan usaha-usaha berarti untuk merilis informasi terkait periode perang serta tidak mendeskripsikan apa *comfort women* itu sendiri maupun tempat-tempat *comfort stations* dalam laporan-laporan yang telah dirilis (Kwon 2014). Pembongkaran fakta secara mendalam baru dipicu setelah kemunculan para korban di ranah publik dan berbagai penelitian ekstensif yang mengungkap bukti-bukti krusial justru dilakukan oleh aktivis, organisasi non-pemerintah, akademisi, hingga *women redress movement*. Abainya pemerintah Jepang mengindikasikan keengganan Jepang untuk mengakui keterlibatannya dalam *comfort women system*, bahkan menghindari kewajiban penuh atas tanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan perang yang telah dilakukan.

Diskursus bahwa perempuan memiliki kerentanan sebagai korban kekerasan seksual mendorong para perempuan yang memiliki pengalaman sama untuk bergabung menjadi satu (Pankhurst 2000, 20), tak hanya secara nasional tetapi juga secara global. Para korban dari Korea Selatan tidak hanya bergabung dalam *women redress movement* nasional, tetapi juga menerima dukungan gerakan-gerakan perempuan internasional. Didukung kesadaran internasional pula, tuntutan-tuntutan para korban *comfort women system* kian signifikan sebagai isu universal perempuan kontemporer dan internasional (Pankhurst 2000, 20) karena para korban tidak dilibatkan dan kepentingannya tidak cukup direpresentasikan oleh kedua pemerintah. Rekonsiliasi berarti pencapaian sebuah resolusi secara damai antara pelaku sebagai pihak yang menyakiti dan korban sebagai pihak yang disakiti, serta terbangunnya hubungan saling percaya antara kedua belah pihak untuk tidak mengulang peristiwa buruk serupa di masa depan (Kumagai 2016, 6). Perlu digarisbawahi bahwa korban sebagai pihak yang disakiti secara spesifik merupakan para perempuan yang dijadikan *comfort women* secara terpaksa di luar keinginan mereka dan

untuk mencapai rekonsiliasi yang final, diperlukan penyelesaian yang berpusat pada perspektif mereka. Penyelesaian isu *comfort women system* seharusnya berpusat pada para perempuan yang menjadi korban terdampak langsung atas sistem ini dan parameter penyelesaian isu ini ialah pemenuhan tuntutan para korban sendiri.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah Jepang telah sepakat dengan pemerintah Korea Selatan untuk mengakhiri isu *comfort women* melalui 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women, permasalahan ini belum selesai dari sudut pandang para korban dari Korea Selatan. Terdapat keabaian pemerintah Jepang atas kepentingan dan hak-hak reparasi serta kondisi pasca perang para perempuan yang menjadi korban, sehingga upaya-upaya pemerintah Jepang tidak sepenuhnya menyelesaikan isu ini dari sudut pandang korban. Tidak adanya urgensi negara untuk melibatkan suara dan perspektif para korban sebagai pihak yang terdampak langsung dalam upaya rekonsiliasi membuat tuntutan-tuntutan para korban yang didukung Jeongdaehyeob atau KCWS sebagai *women redress movement* pun tidak segera sepenuhnya terpenuhi, sehingga mereka menolak 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women dan mengekspos isu ini di komunitas internasional.

Para korban menolak 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women dengan mempertahankan tuntutan-tuntutan utama mereka, yakni: pengakuan Jepang atas tanggung jawab terhadap isu *comfort women*, permintaan maaf secara resmi dan tulus, reparasi penuh dan kompensasi individual bagi tiap korban, serta penguatan fakta dan pembelajaran mengenai sejarah keberadaan *comfort women system*. Tuntutan tanggung jawab tak hanya meliputi tanggung jawab moral, tetapi juga pengakuan pemerintah Jepang atas kesalahan masa lampau. Permintaan maaf meliputi permintaan

maaf pemerintah Jepang secara resmi dan permintaan maaf personal bagi tiap-tiap korban. Reparasi penuh tidak hanya meliputi kompensasi finansial, tetapi pengembalian harga diri korban. Penguakan fakta menyangkut pengakuan pemerintah Jepang terhadap sejarah *comfort women* serta pengajaran sejarah ini bagi para pelajar dan publik demi membangun kesadaran masyarakat dan tidak terjadi kekejaman serupa di masa mendatang.

Belum ada rekonsiliasi pemerintah Jepang yang sepenuhnya memenuhi tuntutan-tuntutan para korban, dari gugatan pertama korban dari Korea Selatan di tahun 1991 hingga berujung pada 2015 Japan-ROK Agreement on *Comfort Women*. Berbagai upaya pemerintah Jepang sendiri diambil ketika terdapat tekanan para korban yang melayangkan gugatan-gugatan hingga menuai sorotan internasional. Tanpa melihat kembali esensi gugatan yang telah dilayangkan para korban

comfort women system sejak 1991 dan merefleksikannya pada pemenuhan tuntutan-tuntutan para korban, maka premis-premis yang disepakati dalam 2015 Japan-ROK Agreement on *Comfort Women* tidak akan menjadi solusi efektif. Rekonsiliasi pemerintah Jepang dan pemerintah Korea Selatan melalui 2015 Japan-ROK Agreement on *Comfort Women* justru berakhir pada tanggung jawab masing-masing negara mengenai pemberian dana dan pemindahan patung serta masih mengesampingkan kondisi para *comfort women* yang mengalami penderitaan fisik dan psikis. Secara mendasar, isu *comfort women* pun tidak bisa dikatakan telah berakhir. Jika para korban tidak menganggap bahwa isu ini selesai, maka berbagai upaya yang telah diambil pemerintah Jepang akan berujung pada deadlock dan mengembalikan isu ini sebagai masalah yang belum usai seperti sebelum-sebelumnya.

Daftar Pustaka

- [1] Asia-Pacific Journal Feature. 2015. "Fact Sheet on Japanese Military 'Comfort Women'", dalam *The Asia-Pacific Journal, Japan Focus*, May 2015, Vol. 13, Issue 19, No. 2, pp. 1-4.
- [2] BBC News. 2015. Japan and South Korea agree WW2 'comfort women' deal [daring], dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-35188135> [diakses 22 Maret 2017].
- [3] BBC News. t.t. Bad Blood Between Japan and Korea [daring], dalam <http://www.bbc.com/news/worldasia32477794> [diakses 22 Maret 2017].
- [4] Choe, Sang-hun, dan Motoko Rich, 2017. Japan Recalls Ambassador to South Korea to Protest 'Comfort Woman' Statue [daring], dalam https://www.nytimes.com/2017/01/06/world/asia/japan-south-korea-ambassador-comfort-woman-statue.html?_r=0 [diakses 22 Maret 2017].
- [5] Digital Museum of The *Comfort Women* Issue and the Asian Women's Fund. t.t. Closing of the Asian's Women's Fund [daring], dalam <http://www.awf.or.jp/e3/dissolution.html> [diakses 29 Oktober 2017].
- [6] European Parliament. 2007. Joint Motion for a Resolution on *Comfort Women* [daring], dalam <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P6RC20070525&language=EN> [diakses 14 Mei 2017].
- [7] Felden, Esther. 2015. Former *comfort woman* tells uncomfoting story [daring], dalam <http://www.dw.com/en/former-comfort-woman-tells-uncomfoting-story/a-17060384> [diakses 3 April 2018].
- [8] Ferguson, Kisha. 2015. Timeline Japan-South Korea Agreement on *Comfort Women* Compensation [daring], dalam <http://www.ctvnews.ca/world/timeline-japan-south-korea-agreement-on-comfort-women-compensation-1.2716164> [diakses 22 Maret 2017].
- [9] Gil, Yun-hyung. 2017. [Analysis] *Comfort women* agreement: a diplomatic debacle in three acts [daring], dalam http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/778148.html [diakses 3 April 2018].
- [10] Hayashi, Hirofumi, 2008. "Disputes in Japan over the Japanese Military "Comfort Women" System and Its Perception in History", dalam *The Annals of the American Academy of Political and Social Science: The Politics of History in Comparative Perspective*, Vol. 617, May 2008. Sage Publications, pp. 123-132.
- [11] Hayashi, Yōko, 1999. "Issues Surrounding the Wartime "Comfort Women"", dalam *Review of Japanese Culture and Society: Violence in the Modern World (Special Issue)*, Vol. 11/12, December 1999-2000.

- Josai University Educational Corporation, pp. 54-65.
- [12] Japan Cabinet Secretariat, 2016. Press Conference by the Chief Cabinet Secretary – December 27, 2016 [daring], dalam http://japan.kantei.go.jp/tyoukanpress/201612/27_a.html [diakses 29 Oktober 2017].
- [13] Japan Cabinet Secretariat, 2017. Press Conference by the Chief Cabinet Secretary – January 6, 2017 [daring], dalam http://japan.kantei.go.jp/tyoukanpress/201701/6_a.html [diakses 29 Oktober 2017].
- [14] Jeongdaehyeob. t.t.a. Objectives and Activities [daring], dalam http://www.womenandwar.net/contents/general/general.asp?page_str_menu=238 [diakses 1 Maret 2018].
- [15] Jeongdaehyeob. t.t.b. The History of Wednesday Demonstration [daring], dalam https://www.womenandwar.net/contents/general/general.asp?page_str_menu=2201 [diakses 1 Juni 2017].
- [16] Jeongdaehyeob, t.t.c. What is the Statue of Peace? [daring], dalam https://www.womenandwar.net/contents/general/general.asp?page_str_menu=174 [diakses 1 Maret 2018].
- [17] Kim, Hee-kang. 2015. "Nationalism, Feminism, and Beyond: A Note on the Comfort Women Movement", dalam *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol 17, No. 1, June 2015, pp. 1-20.
- [18] Korea Verband. 2017. Die Freidensstatue [daring], dalam <http://www.koreaverband.de/trostfrauen/friedensstatue> [diakses 3 April 2018].
- [19] Kumagai, Naoko, 2016. *The Comfort Women; Historical, Political, Legal, and Moral Perspectives* (terj. David Noble). Tokyo: International House of Japan.
- [20] Kwon, Hee-soon, 1994. The Korean Council for the Women Drafted for the Military Sexual Slavery by Japan, dalam <http://www.vcn.bc.ca/alpha/learn/KoreanWomen.htm> [diakses 1 Maret 2018].
- [21] Lee, Na-young, 2014. "The Korean Women's Movement of Japanese Military "Comfort Women": Navigating between Nationalism and Feminism", dalam *The Review of Korean Studies*, Vol. 17, No. 1, June 2014, pp. 71-92.
- [22] Lee, Sue R., 2003. "Comforting the Comfort Women: Who Can Make Japan Pay?", dalam *University of Pennsylvania Journal of Internasional Economic Law*, Vol. 24, No. 2, pp. 509-547.
- [23] Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1993. Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of "comfort women" [daring], dalam <http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/sate9308.html> [diakses 21 Februari 2018].
- [24] Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1995. Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the occasion of the establishment of the "Asian Women's Fund" [daring], dalam <http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/sate9507.html> [diakses 25 Maret 2018].
- [25] Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2015. Address to the Nation on the Agreement on the "Comfort Women" issue [daring], dalam http://www.mofat.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp?typeID=12&boardid=14195&seqno=316814&c=&t=&pagenum=1&tableName=TYPE_ENGLISH&pc=&dc=&wc=&lu=&vu=&iu=&du= [diakses 28 Oktober 2017]b.
- [26] Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015. Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion [daring], dalam http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html [diakses 28 Oktober 2017].
- [27] Mughtar, Adinda Tenriangke, 2013. "Perempuan dalam Konflik", dalam *Gender & Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Jalasutra, Bag. 1, pp. 39-81.
- [28] Pankhurst, Donna. 2000. "Women, Gender, and Peacebuilding", dalam *Working Paper 5 for International Alert*, pp. 1-34.
- [29] Park, Hyun-jung. 2011. Former 'comfort women' hold landmark 1,000th Wednesday Demonstration [daring], dalam http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/510275.html [diakses 29 Oktober 2017].
- [30] Reuters, 2014. Japan's Abe says won't alter 1993 apology on 'comfort women' [daring], dalam <https://www.reuters.com/article/us-japan-korea/japans-abe-says-wont-alter-1993-apology-on-comfort-women-idUSBREA2D04R20140314> [diakses 29 Oktober 2017].
- [31] Reuters, 2015. South Korea's Park urges Japan's Abe to resolve 'comfort women' issue. Dalam <http://www.reuters.com/article/us-southkorea-park/south-koreas-park-urges-japans-abe-to-resolve-comfort-women-issue-idUSKCN0T217120151113> [diakses 29 Oktober 2017].
- [32] Sakamoto, Rumi. 2001. "Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery and Wednesday Demonstration: A Legal and Feminist Approach to the 'Comfort Women' Issue", dalam *New Zealand Journal of Asian Studies*, June 2001, Vol. 3, No. 1, pp. 4-58.
- [33] Sato, Hiroaki. 2014. 'Comfort women' politics in Japan, Korea, U.S. [daring], dalam <http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/12/29/commentary/worldcommentary/comfortwomenpoliticsinjapankoreaus/#.WNRvGzt97IW> [diakses 24 Maret 2017].
- [34] Soh, Chunghee Sarah. 1996. "The Korean "Comfort Women": Movement for Redress, dalam *Asian Survey*, Vol. 36, No. 12, Dec., 1996. University of California Press, pp. 1226-1240.
- [35] Soh, Sarah C. 2001. *Japan's Responsibility Toward Comfort Women* [daring], dalam <http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp77.html> [diakses 18 Februari 2018].

- [36] Task Force on the Review of the Korea-Japan Agreement on the Issue of “Comfort Women”, 2017. Report on the Review of the Korea-Japan Agreement of December 28, 2015 on the Issue of “Comfort Women” Victims” [pdf], dalam http://www.mofa.go.kr/upload/cntnts/result_report_eng.pdf [diakses 27 Maret 2018].
- [37] The Strait Times. 2016. Historic South Korea-Japan deal stumbles over comfort woman statue [daring], dalam [https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/historic-south-korea-japan-deal-](https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/historic-south-korea-japan-deal-stumbles-over-comfort-woman-statue)
- [stumbles-over-comfort-woman-statue](https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/historic-south-korea-japan-deal-stumbles-over-comfort-woman-statue) [diakses 3 April 2018].
- [38] U.S. House of Representatives. 2007. H.Res.121 – 110th Congress (2007-2008): Introduced in House (01/31/2007) [daring], dalam <http://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-resolution/121/text/ih> [diakses 8 Mei 2017].
- [39] Varga, Aniko. 2009. “National Bodies: The ‘Comfort Women’ Discourse and its Controversies in South Korea”, dalam *Studies in Ethnicity and Nationalism*, Vol. 9, No. 2, pp. 287-303.